



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-39.KP.03.03 Tahun 2010

TENTANG

PENGANGKATAN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL ESELON II  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, perlu mengadakan pengangkatan dan alih tugas Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana yang ditetapkan bagi mereka masing-masing.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P/Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-32.KP.04.01 Tahun 2009 tentang Specimen Tanda Tangan.
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-14.KP.03.03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Baperjakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
- PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dibebaskan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : .....





MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2010



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

**PATRIALIS AKBAR**

TEMBUSAN Keputusan ini, disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM;
6. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM;
7. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM;
8. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM;
9. Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM;
10. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM;
11. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM;
12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM;
13. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM;
14. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM;
15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang bersangkutan;
16. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
17. Kepala Lembaga Pemasarakatan yang bersangkutan;
18. Kabag Pullahta Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM.



## DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-39.KP.03.03 Tahun 2010

TANGGAL 18 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	ASYARI SYIHABUDIN RUSDIMARTHANA, S.H., M.H. NIP. 195509151980031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh	Direktur Tata Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Eselon II.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 3.250.000,00
2.	Drs. DANIEL Biantong, S.H., M.H. NIP. 195408031981031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat	sda.
3.	RUZIEF CHANIAGO, S.H. NIP. 195107151976031002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung	sda.
4.	Drs. HARRY PURWANTO NIP. 195201011971101001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat	sda.
5.	IRCHAMNI CHABIBURRACHMAN, S.H, M.H NIP. 195104301981031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat	Inspektur Hukum, Hak Asasi Manusia dan Hak Kekayaan Intelektual pada Inspektorat Jenderal	sda.
6.	INDRO PURWOKO, S.H., M.H. NIP. 196202021985021001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat	sda.
7.	YUSLISARNINGSIH, S.H. NIP. 195511291982032001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual	sda.
8.	MA'MUN, Bc.IP, S.H., M.H. NIP. 195712121981011001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung	Direktur Bina Kemanan dan Ketertiban pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	sda.
					9. ....





MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1	2	3	4	5	6
9.	Drs. ARMAN NAZAR, M.Si. NIP. 195210051978031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Rentan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia	Eselon II.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 3.250.000,00
10.	TASWEM TARIB, S.H., M.H. NIP. 195208081971101001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Rentan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali	
11.	Drs. MURDIYANTO, Bc.IP, S.H., M.M. NIP. 195202211975111001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu	Direktur Bina Perawatan pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan	
12.	Drs. MURDJITO, Bc.IP., S.H., M.H. NIP. 195410131978101001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas I Sukamiskin	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat	sda.
13.	Drs. I NYOMAN SRI YASA, M.H. NIP. 195212311980121001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara TImur	Kepala Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali	Eselon II.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 2.025.000,00
14.	ABDUL WANI, S.H. NIP. 195606071982031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Kepegawaian pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	Kepala Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara TImur	
15.	Drs. AGUS PRIBADIONO, S.H., M.H. NIP. 195408081982031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat	Kepala Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	
16.	FATHLURACHMAN, S.H., M.M. NIP. 195912171986031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Sub Direktorat Sertifikasi dan Pengumuman pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh	sda.

17. ....



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1	2	3	4	5	6
17.	Drs. AGUS RAWAN, S.H., M.M., M.Si NIP. 195508271985031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	Eselon II.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 2.025.000,00
18.	MILTON HASIBUAN, S.H., M.H. NIP. 195306071982031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah	
19.	Drs. ROSMAN SIREGAR, S.H., M.H. NIP. 195511301977031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	
20.	IDA PADMANEGARA, S.H., M.H. NIP. 195506251982032001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Pertemuan Ilmiah pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	sda.
21.	SALAHUDIN, S.H. NIP. 196005051988031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Sub Direktorat Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua	sda.
22.	BAMBANG PALASARA, S.H. NIP. 195808031985031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau	sda.
23.	WAN DARWIS ACHMAYU, S.H. NIP. 195510171983031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi	sda.

24. ....





MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

1	2	3	4	5	6
24.	DJUHARMAN, S.H., M.H. NIP. 195203071978031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu	Eselon II.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 2.025.000,00
25.	PRIYANTO, S.H., M.H. NIP. 196205311981031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat	
26.	DARMORO, Bc.IP., S.H. NIP. 195401191978111001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu	sda.
27.	BAMBANG YUDHOTOMO, Bc.IP., S.H. NIP. 195407301977101001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi	sda.
28.	ABDURRAHMAN SHOHIH, Bc.IP., S.H., M.H. NIP. 195411041977091001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara	sda.
29.	Drs. MUHAMMAD ARIFIEN, M.Si. NIP. 195303171979031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat	sda.
30.	JOHAN YARANGGA, S.Sos. NIP. 195601191981031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat	sda.
31.	R. DARU PRAMONO, S.E., M.Si NIP. 195411051981031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah	sda.





MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

1	2	3	4	5	6
32.	Drs. BUDHI HARMANTO, M.Si. NIP. 195310221978031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngunah Rai	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	Eselon II.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 2.025.000,00
33.	GATOT SUBROTO, S.H., M.M. NIP. 040037041	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Sub Direktorat Detensi dan Deportasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua	
34.	BUDIONO, S.E., M.M. NIP. 195202151978031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat	
35.	Drs. HARI MURTI NIP. 195102271971101001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	
36.	AMIROEL ICHSAN, S.H. NIP. 195212041979031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	sda.
37.	Drs. BAMBANG SUPADIONO, S.H., M.M. NIP. 195504281981031011	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat	sda.
38.	BUDI SANTOSO RACHMAN, S.H., M.H. NIP. 195502241979031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung	sda.
39.	WAHYUDIN UKUN, S.H. NIP. 195502261980031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Sub Direktorat Registrasi dan Penggunaan Dokumen Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat	sda.
40.	Drs. IBRAHIM SALEH, S.H., M.M. NIP. 195604031976031001	Pembina (IV/a)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung	sda.
					41. ....



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

1	2	3	4	5	6
41.	ACHMAD DJUMADI, SE. NIP. 195106271978031006	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	Eselon II.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 2.025.000,00  sda.  sda.  sda.  sda.  sda.  sda.  sda.
42.	Drs. DJOHAN ILDRIM KARIMUDIN NIP. 195107081978031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur	
43.	AJUB SURATMAN, Bc.IP., S.Pd., M.Si. NIP. 196012031985031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung	
44.	Drs. NUR ACHMAD SANTOSA, Bc.IP., S.H. NIP. 195406301979121001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cirebon	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya	
45.	Drs. DARDIANSYAH, Bc.IP., M.H. NIP. 195612301978091001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cirebon	
46.	DEWA PUTU GEDE, Bc.IP., S.H., M.H. NIP. 195910031984031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Balikpapan	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin	
47.	FIRDAUS AMIR, S.H., M.H. NIP. 195405061975111001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai	
48.	RUDHY CHAIDIR NIP. 195405041978031002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan	
49.	Drs. MIRZA ISKANDAR NIP. 195509201980031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat	
					50. ....





MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

1	2	3	4	5	6
50.	Drs. ADJIE INDRAWARMAN HASAN, M.Si. NIP. 195403291978031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam	Eselon II.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 2.025.000,00



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

  
PATRIALIS AKBAR